

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ketika dalam penyelenggaraannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dengan demikian, maka setiap penyelenggaraan pemerintahan ternasuk Surat Keputusan yang dikeluarkan akan memiliki nilai legitiumasi yuridis yang kuat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terdiri dari dua permasalahan yaitu: *Pertama, bagaimana* tanggung jawab hukum akibat pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan itu mangkat atau meninggal. *Kedua, Bagaimana* akibat hukum atas keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Secara garis besar hasil peneltian ini mencakup: *Pertama*, setiap pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan mengatasnamakan jabatannya bukan mengatasnamakan pribadi, karena dilengkapi dengan wewenang. Oleh karena itu tanggung jawab hukum atas keputusan itu melekat pada jabatan yang dijabatinya oleh pejabat tersebut.. Karena jabatan itu melekat pada institusi bukan melekat pada personal atau pihak pejabat. *Kedua*, akibat hukum Keputusan yang dikeluarkan itu sah sepanjang belum dinyatakan batal oleh pengadilan atau di cabut oleh pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.

Kata Kunci : *Tanggung jawab, hukum, pejabat pemerintah, mangkat atau meninggal*

ABSTRACT

The implementation government with good when in implementation guided at regulation legislation the happen and principles general administration who are good or AUPB. With thus, so every implementation government included decree the issued will own score legitimacy juridical the strong one.problem raised in research this consist of two problem namely: first, what about responsibility law result official the issue a decree that pass away or die.second, how because of law on decision that has been issued.this research using research normative juridical law, with statutory approach and conceptual.outline result research this covers: first, every official issued a letter decision on behalf of his office often as on behalf of the individual, becuse equipped with competence. therefore responsibility law on that decision attached to position which he held by officials mentioned. Because the post is attached on personal or officials.second, because of law decision that was issued valid all before declared cancelled by court or unplugged court or revoked by the parties who issued the decision.

Kywords: Responsibility, law,government officials, deceased or deceased

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian.....	
1.4 Kegunaan	
1.5 Keaslian.....	
1.6 Metode Penelitian.....	
1.6.1 Jenis Penelitian.....	
1.6.2 Pendekatan Penelitian	
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	
BAB II TANGGUNG JAWAB PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN AKIBAT MANGKAT ATAU MENINGGAL	
2.1 Pengertian pejabat pemerintah	
2.2 Teori Jabatan	
2.3 Teori pertanggungjawaban	
2.4 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	
BAB III TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM ATAS KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT BERWENANG AKIBAT MANGKAT ATAU MENINGGAL	
3.1 Tanggung jawab hukum terhadap Keputusan yang dikeluarkan pejabat yang mangkat atau meninggal.....	
3.2 Akibat hukum atas Keputusan yang dikeluarkan akibat yang mengeluarkan mangkat atau meninggal.....	
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	
4.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA.....	